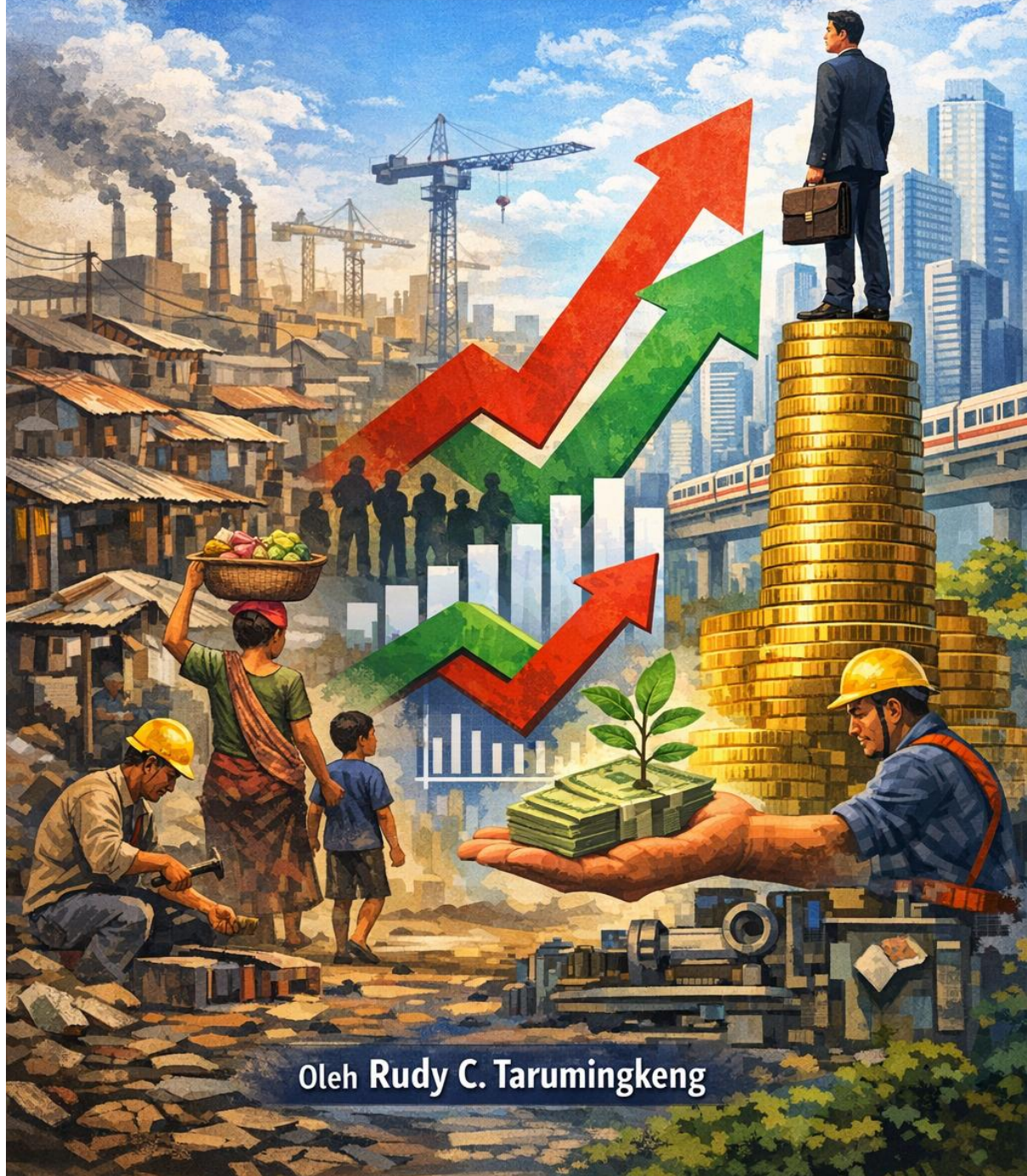


TRANSFORMASI EKONOMI DAN PRODUKTIVITAS:

Mengapa Pertumbuhan Tidak Otomatis
Menurunkan Ketimpangan



Oleh Rudy C. Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Transformasi ekonomi dan produktivitas:
mengapa pertumbuhan tidak otomatis menurunkan ketimpangan*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)
Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991
Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)
Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)
AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyclt75@gmail.com

16 Februari 2026

Bogor, Indonesia

Makalah ini menghubungkan **transformasi ekonomi**, **pertumbuhan produktivitas**, dan **ketimpangan**, lalu menjelaskan mekanisme-mekanisme mengapa pertumbuhan tidak otomatis “menetes” menjadi pemerataan—dilengkapi narasi kasus Indonesia dan implikasi kebijakan.

TRANSFORMASI EKONOMI DAN PRODUKTIVITAS: MENGAPA PERTUMBUHAN TIDAK OTOMATIS MENURUNKAN KETIMPANGAN

Abstrak

Dalam teori pembangunan, pertumbuhan ekonomi sering diasosiasikan dengan penurunan kemiskinan dan, pada tahap tertentu, penurunan ketimpangan. Namun pengalaman banyak negara—termasuk Indonesia—menunjukkan bahwa **pertumbuhan dan produktivitas dapat meningkat sementara ketimpangan bertahan, bahkan melebar**. Artikel ini menjelaskan penyebabnya melalui tiga lensa yang saling terkait: (1) **sifat transformasi struktural** (pergeseran tenaga kerja dan modal antar-sektor) dan kualitas pekerjaan yang tercipta; (2) **mekanisme distribusi** (siapa memperoleh kenaikan produktivitas: pekerja, pemilik modal, atau pelaku dengan kekuatan pasar); (3) **arsitektur institusi dan kebijakan** (pajak–transfer, pendidikan, regulasi pasar tenaga kerja, kompetisi, dan tata kelola).

Dengan memanfaatkan temuan dan data lembaga resmi, terlihat bahwa ketimpangan pengeluaran Indonesia pada **September 2024** (Gini 0,381) masih mencerminkan jarak yang berarti antara kelompok atas dan bawah; bahkan **porsi pengeluaran 40% terbawah** hanya sekitar **18,41%** (lebih rendah di perkotaan). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Di sisi pasar kerja, riset **World Bank** menunjukkan bahwa transformasi struktural selama dua dekade terakhir banyak menciptakan pekerjaan di **jasa berproduktivitas rendah** yang produktivitasnya tidak jauh di atas pertanian, sehingga tidak cukup mendorong “pekerjaan kelas menengah” (middle-class jobs). ([World Bank](#)) Pada saat yang sama, berkurangnya peran manufaktur dalam PDB dari puncak awal 2000-an ke kisaran akhir 2010-an–2020-an memperlemah mesin historis penciptaan pekerjaan formal berupa lebih tinggi—fenomena yang selaras dengan argumen **premature deindustrialization** dari Dani Rodrik. ([Institute for Advanced Study](#))

Kesimpulannya, ketimpangan tidak otomatis turun karena “**siapa yang bekerja di mana**” (struktur sektor dan firma), “**siapa yang memegang aset dan kekuatan tawar**”, dan “**aturan main distribusi**” lebih menentukan hasil pemerataan daripada sekadar kenaikan PDB. Karena itu, agenda kebijakan yang efektif bukan hanya “mengejar pertumbuhan”, melainkan **mendesain produktivitas yang inklusif**: produktivitas naik di sektor padat kerja, upah riil ikut bergerak, mobilitas pekerja lintas sektor dimudahkan, dan sistem pajak–transfer menutup celah yang tidak bisa ditutup pasar.

1) Pendahuluan: paradoks pertumbuhan—mengapa “naik rata-rata” tidak identik dengan “turun jarak”

Dalam percakapan publik, pertumbuhan ekonomi sering dibayangkan seperti “air pasang” yang mengangkat semua perahu. Ketika PDB meningkat, perusahaan memproduksi lebih banyak, tenaga kerja terserap, pendapatan rumah tangga naik, kemiskinan turun, dan—secara intuitif—

ketimpangan ikut menyempit. Tetapi kenyataan sosial-ekonomi sering bergerak dengan logika yang lebih berlapis.

Bayangkan sebuah kota-kabupaten di pinggiran koridor industri. Sebuah smelter atau fasilitas hilirisasi berdiri megah, investasi besar masuk, output melonjak, dan PDRB setempat meningkat drastis. Namun lapangan kerja langsung yang tercipta terbatas karena teknologi padat modal. Sementara itu, pelaku UMKM di sekitarnya tidak otomatis naik produktivitas: akses pasar, keterampilan manajerial, digitalisasi, dan modal kerja tetap menjadi hambatan. Akhirnya, "rata-rata" wilayah naik, tetapi **jarak** antara kelompok yang terkait langsung dengan rantai nilai proyek (pemilik lahan, kontraktor, pekerja terampil, pemasok besar) dengan pekerja informal dan usaha mikro tetap lebar. Dalam narasi ini, pertumbuhan ada, tetapi pemerataan tidak terjadi secara otomatis.

Paradoks tersebut muncul karena **pertumbuhan adalah besaran agregat**, sedangkan ketimpangan adalah **pola distribusi**. Dua hal ini hanya berkaitan erat jika ada mekanisme yang menyalurkan kenaikan produktivitas menjadi peningkatan pendapatan luas. Pada titik inilah transformasi ekonomi (structural transformation) menjadi penting—bukan sekadar "pindah sektor", melainkan **pindah ke sektor/firma yang lebih produktif** dan **menciptakan pekerjaan berkualitas**.

2) Konsep-konsep kunci: transformasi ekonomi, produktivitas, dan ketimpangan

2.1 Transformasi ekonomi (transformasi struktural)

Transformasi ekonomi biasanya merujuk pada pergeseran komposisi output, tenaga kerja, dan kapital dari sektor tradisional (misalnya pertanian subsisten) ke sektor modern (manufaktur, jasa modern, industri berteknologi). Namun ada perbedaan penting antara:

Transformasi nominal: tenaga kerja pindah dari pertanian ke jasa, tetapi jasa yang dimasuki adalah jasa informal berproduktivitas rendah (perdagangan kecil, transportasi informal, layanan personal skala mikro).

Transformasi berkualitas: tenaga kerja pindah menuju firma yang lebih produktif, berorientasi ekspor atau melayani pasar nasional dengan standar tinggi, dengan keterampilan meningkat dan perlindungan kerja lebih baik.

Keduanya sama-sama “pindah sektor”, tetapi hanya yang kedua cenderung menciptakan **kenaikan produktivitas yang tersebar**.

2.2 Produktivitas: lebih dari sekadar “bekerja lebih keras”

Produktivitas secara sederhana adalah output per unit input. Dalam ekonomi makro, sering dibahas:

Produktivitas tenaga kerja: output per pekerja atau per jam kerja.

Total Factor Productivity (TFP): efisiensi gabungan modal dan tenaga kerja—sering dianggap proksi inovasi, manajemen, dan teknologi.

Poin krusial: produktivitas bisa naik karena dua alasan yang berbeda dampak distributifnya:

Inovasi padat keterampilan/padat modal: menaikkan output, tetapi manfaatnya terkonsentrasi pada pekerja berkeahlian tinggi dan pemilik modal.

Difusi produktivitas lintas firma: praktik manajemen, teknologi, dan akses pasar menyebar ke banyak perusahaan (termasuk UMKM), sehingga manfaatnya lebih merata.

2.3 Ketimpangan: pendapatan, pengeluaran, dan kekayaan

Ketimpangan dapat diukur pada beberapa dimensi:

Ketimpangan pendapatan (income inequality): perbedaan pendapatan antar rumah tangga.

Ketimpangan pengeluaran/konsumsi (expenditure inequality): sering lebih stabil dan banyak digunakan dalam survei rumah tangga.

Ketimpangan kekayaan (wealth inequality): kepemilikan aset (tanah, properti, saham) yang biasanya lebih timpang daripada pendapatan.

Di Indonesia, rilis resmi **Badan Pusat Statistik** menekankan ketimpangan pengeluaran dengan Gini ratio. Pada **September 2024**, Gini Indonesia tercatat **0,381**, dengan Gini perkotaan **0,402** dan perdesaan **0,308**. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Ini menegaskan bahwa ruang ketimpangan terutama “mengental” di wilayah urban, tempat aglomerasi ekonomi modern terkonsentrasi.

3) Mengapa pertumbuhan tidak otomatis menurunkan ketimpangan: delapan mekanisme utama

Mekanisme 1 — “Pertumbuhan yang salah sektor”: transformasi menuju jasa berproduktivitas rendah

Dalam sejarah pembangunan klasik, manufaktur menjadi mesin utama karena: (a) menyerap tenaga kerja besar; (b) memungkinkan pembelajaran (learning-by-doing); (c) mendorong ekspor; (d) menaikkan upah dan keterampilan.

Namun banyak negara berkembang mengalami pergeseran dari pertanian langsung ke jasa yang tidak selalu modern. Dalam kondisi ini, pekerja keluar dari pertanian, tetapi masuk ke jasa informal yang produktivitasnya hanya sedikit lebih tinggi. Maka, rata-rata PDB bisa naik (karena investasi tertentu atau kenaikan harga komoditas), tetapi **pekerjaan massal berkualitas** tidak tumbuh.

Temuan **World Bank** tentang Indonesia sangat relevan: pekerjaan yang tercipta melalui transformasi struktural selama dua dekade terakhir “belum membawa kenaikan produktivitas yang dibutuhkan” karena banyak pekerjaan baru muncul di **jasa berproduktivitas rendah**, di

mana produktivitas tenaga kerja “tidak jauh lebih tinggi daripada pertanian.” ([World Bank](#)) Bila demikian, jarak pendapatan antarkelompok tidak otomatis mengecil, karena mobilitas sektor tidak sama dengan mobilitas kelas pendapatan.

Implikasi distributif:

Kelompok atas (pemilik aset, pekerja profesional, pelaku usaha skala besar) menikmati kenaikan pendapatan lebih cepat.

Kelompok bawah berpindah pekerjaan, tetapi tetap dalam ekosistem produktivitas rendah, sehingga kenaikan pendapatan kecil dan rentan guncangan.

Mekanisme 2 — “Produktivitas naik, upah tidak ikut”: lemahnya pass-through ke pekerja

Secara teori, bila produktivitas pekerja naik, perusahaan bisa membayar upah lebih tinggi. Tetapi dalam praktik, hubungan produktivitas–upah dipengaruhi oleh:

kekuatan tawar pekerja (serikat, bargaining, informasi pasar kerja),

struktur pasar tenaga kerja (monopsoni/oligopsoni),

praktik outsourcing dan kontrak jangka pendek,

segmen informal yang upahnya lebih ditentukan oleh daya tawar harian daripada produktivitas.

Jika produktivitas naik tetapi sebagian besar surplus menjadi laba, dividen, atau rente, maka ketimpangan meningkat: pemilik modal lebih cepat kaya, sementara pekerja mendapat bagian kecil.

Inilah sebabnya “**job-rich growth**” (pertumbuhan yang kaya lapangan kerja) berbeda dari “**wage-rich growth**” (pertumbuhan yang kaya kenaikan upah riil). Pertumbuhan bisa menciptakan pekerjaan, tetapi jika pekerjaan itu berupah rendah dan tanpa perlindungan, ketimpangan tidak turun.

Mekanisme 3 — Teknologi bias keterampilan: pendidikan dan skill premium memperlebar jarak

Transformasi digital—termasuk otomasi, analitik data, dan AI—cenderung menaikkan permintaan terhadap keterampilan kognitif, analitis, dan sosial tingkat tinggi; sementara pekerjaan rutin menurun atau stagnan. Di sini ketimpangan melebar bukan karena “orang miskin makin malas”, melainkan karena struktur permintaan keterampilan berubah lebih cepat daripada kemampuan sistem pendidikan dan pelatihan menghasilkan keterampilan baru.

Riset **World Bank** menekankan persoalan keterampilan Indonesia: **57%** angkatan kerja berpendidikan menengah pertama ke bawah, dan kualitas pembelajaran lemah (tahun sekolah tidak setara dengan tahun belajar efektif). ([World Bank](#)) Dalam situasi ini, teknologi menjadi “eskalator” bagi pekerja terampil, tetapi “tangga curam” bagi pekerja berpendidikan rendah—membuat pertumbuhan produktivitas tidak otomatis merata.

Mekanisme 4 — Ketimpangan aset: ketika pertumbuhan didorong modal, hasilnya condong ke pemilik modal

Jika pendorong pertumbuhan utama adalah investasi besar, proyek infrastruktur, atau industri padat modal, maka share pendapatan yang mengalir ke pemilik modal cenderung lebih besar. Ketimpangan meningkat jika kepemilikan aset terkonsentrasi.

Di banyak negara, kekayaan (tanah, properti, saham) jauh lebih timpang daripada pendapatan. Ketika nilai aset naik (misalnya properti di kota besar), kelompok pemilik aset memperoleh capital gain, sedangkan penyewa menghadapi kenaikan biaya hidup. Akibatnya, meskipun PDB naik, daya beli relatif kelompok bawah bisa tertekan.

Mekanisme 5 — “Winner-take-most”: platform, superstar firms, dan konsentrasi pasar

Ekonomi digital menciptakan pasar dengan efek jaringan (network effects): pemenang cenderung mengambil porsi pasar besar. Platform besar bisa meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperbesar konsentrasi laba. Ketika produktivitas meningkat melalui skala dan data, keuntungan bisa sangat terkonsentrasi pada segelintir perusahaan dan talenta puncak (superstar).

Dalam literatur kebijakan, relasi produktivitas dan inklusivitas dipandang saling terkait: kesenjangan produktivitas antar perusahaan dapat berkaitan dengan kesenjangan upah dan peluang. Bila difusi teknologi hanya terjadi pada perusahaan terdepan, sementara perusahaan kecil tertinggal, ketimpangan melebar walau produktivitas agregat naik.

Mekanisme 6 — Globalisasi dan rantai nilai: “integrasi” tidak sama dengan “nilai tambah dibagi”

Integrasi ke rantai nilai global (GVC) bisa mengangkat produktivitas melalui teknologi, standar, dan pasar ekspor. Namun dampaknya pada ketimpangan bergantung pada posisi negara dalam rantai nilai:

Jika negara berada pada tahap bernilai tambah rendah (assembly sederhana, komoditas mentah), upah dan linkages domestik terbatas.

Jika negara naik kelas (design, engineering, branding, logistik canggih), upah dan produktivitas menyebar lebih luas.

Indonesia sering menghadapi tantangan pada penciptaan pekerjaan kelas menengah melalui struktur firma: dua pertiga pekerjaan berada di usaha rumah tangga dengan puluhan juta pemilik dan pekerja yang hampir semuanya informal. ([World Bank](#)) Ini membuat “tangga menuju formalitas” dan integrasi ke pasar modern menjadi pendek—atau terputus—bagi mayoritas pekerja.

Mekanisme 7 — Ketimpangan spasial: aglomerasi kota menciptakan pertumbuhan cepat, tetapi juga “premium lokasi”

Aglomerasi (Jakarta dan kota besar lainnya) menciptakan produktivitas tinggi karena kedekatan pasar, jaringan pemasok, dan infrastruktur. Tetapi aglomerasi juga menciptakan “premium lokasi”: harga tanah naik, biaya hidup meningkat, dan akses perumahan menjadi mahal. Kelompok yang memiliki properti atau aset urban memperoleh keuntungan, sedangkan pekerja berupah rendah menghadapi tekanan biaya.

Data BPS memperlihatkan Gini perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Ini konsisten dengan gagasan bahwa kota adalah pusat produktivitas sekaligus pusat ketimpangan, karena kesempatan dan biaya terkonsentrasi bersamaan.

Mekanisme 8 — Kebijakan dan institusi: pajak–transfer, layanan publik, dan tata kelola menentukan “hasil akhir”

Pasar tidak dirancang untuk pemerataan; ia dirancang untuk alokasi. Pemerataan membutuhkan institusi:

sistem pajak yang adil dan efektif,

belanja sosial yang tepat sasaran,

layanan publik universal (pendidikan, kesehatan),

regulasi kompetisi untuk mencegah rente,

perlindungan tenaga kerja yang menjaga keseimbangan fleksibilitas dan keamanan (flexicurity).

Dalam rilis BPS, ukuran Bank Dunia tentang kelompok 40% terbawah menunjukkan porsi pengeluaran mereka sekitar **18,41%** (lebih rendah di perkotaan). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Fakta ini mengingatkan bahwa tanpa redistribusi efektif dan peningkatan kesempatan, pertumbuhan tidak akan otomatis memperbesar “kue” bagian bawah.

4) Narasi Indonesia: ketika transformasi kerja tidak menjadi transformasi kelas

4.1 Ketimpangan pengeluaran masih nyata

Menurut **Badan Pusat Statistik**, ketimpangan pengeluaran Indonesia pada September 2024 (Gini **0,381**) naik sedikit dari Maret 2024 (0,379), dan lebih rendah daripada Maret 2023 (0,388). ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Meski tidak ekstrem, angka ini menandakan struktur distribusi yang belum “pulih” menjadi lebih setara, terutama di perkotaan.

Lebih penting lagi, ukuran Bank Dunia yang ditampilkan BPS memperlihatkan porsi pengeluaran **40% terbawah** sekitar **18,41%**, sedangkan 60% sisanya mengambil lebih dari 81%. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#)) Ini bukan sekadar statistik; ia menggambarkan perbedaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan modal sosial—yang pada gilirannya memengaruhi produktivitas antargenerasi.

4.2 Penciptaan kerja banyak, tetapi “pekerjaan kelas menengah” terbatas

Rangkaian temuan **World Bank** sangat membantu membaca paradoks ini. Antara 2009–2019 Indonesia menciptakan rata-rata **2,4 juta** pekerjaan baru per tahun dan pengangguran turun. ([World Bank](#)) Tetapi pekerjaan yang mencukupi standar hidup kelas menengah tidak tercipta dalam skala yang memadai: dari 85 juta pencari nafkah, hanya sekitar **13 juta (15%)** mencapai ambang pendapatan kelas menengah; dan hanya **3,5 juta** pekerja bergaji yang berada di atas ambang itu serta memiliki manfaat sosial penuh dan kontrak tidak terbatas. ([World Bank](#))

Kunci penjelasannya ada pada kualitas transformasi struktural: banyak pekerjaan baru berada di jasa produktivitas rendah, sehingga perpindahan keluar dari pertanian tidak otomatis menaikkan pendapatan secara berarti. ([World Bank](#)) Di sini kita melihat bahwa transformasi sektor tanpa transformasi produktivitas dan kualitas kerja tidak cukup mengurangi ketimpangan.

4.3 Melemahnya mesin manufaktur dan risiko “deindustrialisasi dini”

Sejumlah literatur pembangunan menempatkan manufaktur sebagai mesin pemerataan karena padat kerja dan relatif mudah menyerap pekerja semi-terampil. Namun banyak negara mengalami “deindustrialisasi lebih dini”—manufaktur menyusut sebelum negara mencapai pendapatan tinggi. Dani Rodrik mendokumentasikan bahwa hubungan “berbentuk punuk” antara industrialisasi dan pendapatan bergeser sehingga negara “kehabisan peluang industrialisasi” pada tingkat pendapatan lebih rendah dibanding negara yang industrialisasi lebih awal; globalisasi dan teknologi hemat tenaga kerja menjadi faktor pendorong. ([Institute for Advanced Study](#))

Dalam konteks Indonesia, indikator manufaktur sebagai porsi PDB menunjukkan tren penurunan dari puncaknya di awal 2000-an menuju kisaran sekitar akhir 2010-an–2020-an; beberapa kompilasi data berbasis WDI menempatkan angka Indonesia sekitar **18,98% pada 2024** dan puncak historis sekitar **31,95% pada 2002**. ([TheGlobalEconomy.com](#)) Intinya bukan sekadar “angka sektor”, melainkan konsekuensi distribusinya: ketika manufaktur tidak tumbuh sebagai penyerap tenaga kerja formal, pekerja banyak “berlabuh” di jasa informal, sehingga ketimpangan bertahan.

Catatan penting: ini tidak berarti “manufaktur selalu solusi”. Manufaktur modern juga bisa padat modal. Tetapi manufaktur yang terintegrasi ke rantai nilai, dengan ekosistem pemasok domestik dan kompetensi teknis, secara historis lebih mampu menciptakan mobilitas pendapatan massal dibanding jasa informal yang terfragmentasi.

4.4 Struktur firma dan informalitas: produktivitas nasional “terbelah dua”

Temuan World Bank tentang struktur firma Indonesia menyebut dua pertiga pekerjaan berada pada usaha rumah tangga (household enterprises) dengan puluhan juta pemilik dan pekerja yang hampir semuanya informal. ([World Bank](#)) Secara ekonomi, ini berarti

produktivitas nasional tidak naik "rata": ada segmen modern yang produktif dan segmen luas yang produktivitasnya rendah.

Situasi "dual economy" semacam ini membuat pertumbuhan agregat tidak otomatis menurunkan ketimpangan karena:

produktivitas tinggi terkonsentrasi pada segmen kecil,

pekerja mayoritas berada pada segmen rendah dengan hambatan naik kelas (skills, modal, legalitas, jaringan pasar).

5) Kerangka analitis: peta hubungan transformasi–produktivitas–ketimpangan

5.1 Rumus sederhana yang sering menyesatkan

Narasi populer sering implicit memakai rumus:

Pertumbuhan PDB → Lapangan kerja → Upah naik → Ketimpangan turun.

Tetapi rantai ini sering terputus di beberapa titik:

Pertumbuhan tidak menciptakan cukup pekerjaan (jobless growth).

Pekerjaan tercipta, tetapi di sektor informal berupah rendah (low-quality job growth).

Produktivitas naik, tetapi upah stagnan karena bargaining lemah (decoupling productivity–wages).

Biaya hidup (perumahan, transport) naik lebih cepat di kota, menggerus upah riil.

Keuntungan produktivitas terkonsentrasi sebagai laba dan capital gain.

5.2 Decomposition yang lebih realistis: "di mana produktivitas naik, di mana orang bekerja"

Dalam kajian produktivitas, peningkatan produktivitas agregat biasanya berasal dari:

within-sector productivity growth: sektor yang sama menjadi lebih efisien;

structural change: pekerja pindah dari sektor kurang produktif ke sektor lebih produktif.

Masalahnya, bila structural change terjadi ke sektor yang *tidak jauh lebih produktif* (misalnya pertanian → jasa informal), maka kontribusi structural change terhadap produktivitas agregat kecil, dan dampak distributifnya lemah.

Temuan World Bank menegaskan hal ini untuk Indonesia: pekerjaan baru banyak di jasa berproduktivitas rendah, sehingga produktivitas tidak melonjak cukup untuk menciptakan pekerjaan kelas menengah. ([World Bank](#))

5.3 “Distribution channel”: siapa yang menangkap surplus produktivitas

Pertanyaan paling menentukan ketimpangan adalah: **siapa yang menangkap surplus** ketika produktivitas naik?

Jika surplus dibagi melalui upah, kesempatan kerja, dan harga barang yang turun, ketimpangan cenderung turun.

Jika surplus menjadi laba, rente, dan capital gain yang terkonsentrasi, ketimpangan naik.

Karena itu, kebijakan produktivitas yang “netral” bisa menghasilkan dampak ketimpangan yang berbeda tergantung institusi.

6) Agenda kebijakan: mendesain produktivitas yang inklusif (bukan sekadar produktivitas tinggi)

Bagian ini bukan “daftar belanja”, melainkan logika desain: **membuat kenaikan produktivitas dapat diakses oleh banyak orang**, dan memastikan pasar serta negara sama-sama bekerja menutup celah distribusi.

6.1 Produktivitas lintas sektor—terutama sektor padat kerja dan bernilai tambah rendah

World Bank menyarankan promosi produktivitas “across the board”, termasuk sektor bernilai tambah rendah, melalui kebijakan yang meningkatkan kompetisi, menurunkan biaya perdagangan, menarik FDI berorientasi ekspor, dan memperkuat iklim usaha agar lebih predictable dan level playing field. ([World Bank](#))

Dalam konteks pemerataan, kebijakan produktivitas yang paling “pro-equity” biasanya adalah yang:

menaikkan produktivitas di sektor yang menyerap tenaga kerja besar (agroindustri, manufaktur padat kerja, logistik, jasa modern produktif), memperkuat linkages domestik (pemasok UMKM naik kelas), mendorong difusi teknologi (bukan hanya “frontier firms”).

6.2 Mobilitas pekerja: dari perlindungan pekerjaan ke perlindungan pekerja (flexicurity)

Ketimpangan sering bertahan karena pekerja sulit berpindah ke pekerjaan lebih produktif. Mobilitas membutuhkan:

informasi pasar kerja (job matching),

pelatihan ulang (reskilling),

dukungan transisi (asuransi pengangguran atau bantuan sementara),

regulasi yang tidak menghukum perpindahan.

World Bank menekankan perlunya dukungan perpindahan kerja termasuk mekanisme semacam unemployment insurance agar transisi ke pekerjaan lebih baik memungkinkan. ([World Bank](#))

6.3 Keterampilan dan kualitas belajar: mengurangi “skill gap” sebagai akar ketimpangan

Jika skill premium meningkat, maka memperbaiki pendidikan dan pelatihan bukan agenda sosial semata, tetapi agenda produktivitas dan pemerataan sekaligus. Temuan tentang rendahnya pendidikan (57% menengah pertama ke bawah) dan learning outcomes yang rendah menunjukkan bahwa ketimpangan masa depan bisa “diproduksi ulang” oleh sistem keterampilan yang tertinggal. ([World Bank](#))

Strategi praktis:

fokus pada literasi–numerasi–problem solving (pondasi semua keterampilan),

TVET yang link-and-match dengan industri,

micro-credential dan pelatihan modular bagi pekerja dewasa,

insentif bagi perusahaan yang melatih pekerja (apprenticeship).

6.4 Struktur firma: naik kelasnya UMKM sebagai strategi pemerataan produktivitas

Jika dua pertiga pekerjaan berada pada usaha rumah tangga yang informal, maka “mesin pemerataan” tidak cukup hanya menunggu investasi besar. Harus ada strategi:

formalization yang tidak menambah beban berlebihan,

pembiayaan produktif berbasis cashflow (bukan agunan semata),

dukungan manajemen, digitalisasi, standar mutu, dan akses rantai pasok,

cluster dan agregator agar usaha mikro tidak sendirian menghadapi pasar modern.

6.5 Kebijakan kompetisi dan anti-rente

Pertumbuhan yang didorong rente (monopoli, perizinan yang mengunci, konsesi yang tidak transparan) cenderung menaikkan ketimpangan karena surplus tidak dibagi melalui upah, tetapi melalui keuntungan eksklusif. Kebijakan pro-kompetisi memperluas peluang produktif, terutama bagi pemain baru dan daerah.

6.6 Pajak dan belanja publik: menutup celah yang tidak bisa ditutup pasar

Bila porsi pengeluaran 40% terbawah stagnan di sekitar 18%, maka perlu memastikan bahwa:

belanja pendidikan dan kesehatan benar-benar menaikkan mobilitas, perlindungan sosial mengurangi volatilitas pendapatan,

pajak properti/kapital dan kepatuhan pajak memperkuat kapasitas negara membiayai layanan publik.

Catatan: kebijakan redistribusi yang efektif tidak harus "mematikan pertumbuhan". Justru, ketimpangan yang terlalu tinggi bisa menghambat akumulasi human capital dan stabilitas sosial.

7) Sebuah "diagnostic checklist" untuk menilai apakah pertumbuhan akan inklusif

Agar diskusi tidak berhenti pada slogan, berikut kerangka diagnosis yang bisa dipakai dalam riset, kuliah, atau policy brief:

Mesin pertumbuhan: sektor apa yang mendorong pertumbuhan (komoditas, manufaktur, jasa modern, infrastruktur)?

Intensitas tenaga kerja: berapa pekerjaan tercipta per unit investasi/output?

Kualitas kerja: formalitas, jam kerja layak, jaminan sosial, upah riil.

Pass-through produktivitas ke upah: apakah upah median naik sejalan produktivitas?

Hambatan mobilitas: skill gap, biaya pindah kerja, mismatch lokasi, informasi.

Distribusi aset dan biaya hidup: properti, sewa, transport, akses layanan publik.

Struktur firma: dominasi mikro-informal vs perusahaan menengah yang tumbuh.

Kebijakan redistribusi: pajak, transfer, layanan publik, dan efektivitas targeting.

Kompetisi dan rente: apakah pasar terbuka bagi pemain baru?

Dimensi spasial: kesenjangan antarwilayah, konektivitas, dan aglomerasi.

Jika 1–3 kuat tetapi 4–10 lemah, besar kemungkinan pertumbuhan tidak menurunkan ketimpangan.

8) Kesimpulan: pertumbuhan adalah perlu, tetapi bukan cukup

Pertumbuhan dan produktivitas tetap prasyarat penting untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, **ketimpangan adalah hasil dari struktur**: struktur sektor, struktur firma, struktur kepemilikan aset, struktur keterampilan, dan struktur aturan main. Karena itu, pertanyaan kebijakan yang tepat bukan “bagaimana tumbuh cepat”, melainkan:

Tumbuh lewat sektor apa?

Pekerjaan apa yang tercipta?

Siapa yang menangkap surplus produktivitas?

Bagaimana mobilitas dan perlindungan transisi pekerja?

Seberapa cepat UMKM naik kelas dan menjadi produktif?

Apakah pajak–transfer dan layanan publik cukup kuat menutup celah?

Pengalaman Indonesia memperlihatkan bahwa penciptaan kerja yang besar belum otomatis menghasilkan pekerjaan kelas menengah karena transformasi struktural banyak mengarah ke jasa berproduktivitas rendah dan struktur firma yang didominasi usaha kecil-informal. ([World Bank](#)) Di sisi lain, indikator ketimpangan pengeluaran tetap menunjukkan jarak yang berarti, khususnya di perkotaan, dengan porsi pengeluaran 40% terbawah yang masih rendah. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Maka jawaban akademiknya tegas: **pertumbuhan tidak otomatis menurunkan ketimpangan** karena pasar mengagregasi output, tetapi tidak mengagregasi keadilan. Pemerataan memerlukan desain transformasi ekonomi yang menghasilkan produktivitas yang menyebar—dan institusi yang memastikan hasilnya terdistribusi secara lebih adil.

Glosarium ringkas

Aglomerasi: pemusatan aktivitas ekonomi di wilayah tertentu yang menaikkan produktivitas sekaligus biaya hidup.

Bottom 40%: 40 persen kelompok pengeluaran terbawah (ukuran “shared prosperity” yang sering dipakai).

Decoupling: terlepasnya hubungan produktivitas dan upah.

Difusi teknologi: penyebaran inovasi dari perusahaan terdepan ke perusahaan lain.

Gini Ratio: indeks ketimpangan (0 = merata sempurna; 1 = timpang sempurna).

Household enterprises: usaha rumah tangga skala mikro, sering informal.

Informalitas: pekerjaan/usaha di luar skema formal (kontrak, jaminan sosial, pencatatan).

Jobless growth: pertumbuhan output tanpa pertumbuhan kerja yang sepadan.

Middle-class jobs: pekerjaan dengan pendapatan dan perlindungan yang memungkinkan standar hidup kelas menengah.

Monopsoni: pasar tenaga kerja dengan sedikit pemberi kerja dominan, melemahkan daya tawar pekerja.

Pass-through: seberapa besar kenaikan produktivitas diterjemahkan menjadi kenaikan upah/harga lebih murah.

Premature deindustrialization: menurunnya manufaktur sebelum negara mencapai pendapatan tinggi.

Produktivitas tenaga kerja: output per pekerja/jam kerja.

Rente: keuntungan "di atas normal" akibat privilese/kekuatan pasar, bukan efisiensi.

Structural transformation: pergeseran tenaga kerja dan output antar sektor ekonomi.

TFP: produktivitas faktor total; efisiensi gabungan modal–tenaga kerja.

Winner-take-most: struktur pasar di mana pemenang memperoleh pangsa dan laba sangat besar.

Skill premium: selisih upah antara pekerja terampil dan kurang terampil.

Referensi pilihan

Badan Pusat Statistik. (15 Januari 2025). *Gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0,381*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

*Rudy C Tarumingkeng: Transformasi ekonomi dan produktivitas:
mengapa pertumbuhan tidak otomatis menurunkan ketimpangan*

Badan Pusat Statistik. (1 Juli 2024). *Gini ratio Maret 2024 tercatat sebesar 0,379*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

World Bank. (30 Juni 2021). *Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia* (key findings page). ([World Bank](#))

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *How is productivity linked to inclusiveness?*

Dani Rodrik. (2015). *Premature Deindustrialization*. ([Institute for Advanced Study](#))

World Bank WDI-based compilations on manufacturing value added share (Indonesia). ([TheGlobalEconomy.com](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 15 Februari 2026. Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/6992695b-cfdc-83a0-be7d-e5f9f7c67f52>